

Cite this: *J.SST*, Vol 4 (1):
131-137, 2024

Received Date:
3 Oktober 2024
Accepted Date:
19 Oktober 2024

Keywords:

Political Communication, Legislative-Executive

Kata kunci:

Komunikasi Politik, Legislatif-Eksekutif

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>
(contoh)

Strategi Komunikasi Politik Legislatif-Eksekutif dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Maros

Legislative-Executive Political Communication Strategy in Increasing Public Trust in Maros Regency

Andi Patarai Amir^{1*}; Muh. Akbar²; Muhammad Asdar³

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

*Email: patarai.amir@gmail.com; (Email institusi, pascasarjana@unifa.ac.id)

Abstract. *This study aims to analyze the strategy of legislative-executive political communication in increasing the trust of the Maros people and to analyze what efforts are made by the legislative-executive in increasing the trust of the Maros people. The results of research and discussion in this study are that in building political communication between the legislature and the executive, a minimum of four indicators are needed in particular, namely: (1) legislative and executive attitudes and behavior, (2) the development of legislative interaction with the executive, (3) changes in the structure (patterns of interaction) of the legislature with the executive, and (4) description of the constraints of the relationship. Meanwhile, the efforts made by the legislature with the executive in building public trust by showing good and measurable relations, especially in producing public policies intended for the welfare of the people of Maros district*

Keywords: *Political Communication, Legislative-Executive*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik legislatif-eksekutif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Maros dan untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh legislatif-eksekutif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Maros. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam membangun komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif maka diperlukan minimal empat indikator secara khusus yaitu: (1) sikap dan perilaku legislatif dan eksekutif, (2) perkembangan interaksi legislatif dengan eksekutif, (3) perubahan struktur (pola-pola interaksi) legislatif dengan eksekutif, serta (4) deskripsi kendala hubungan tersebut. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh legislatif dengan eksekutif dalam membangun kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hubungan baik dan terukur terutama dalam menghasilkan kebijakan publik yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Maros

Kata kunci: Komunikasi Politik, Legislatif-Eksekutif

PENDAHULUAN

Manusia melakukan komunikasi melalui jaringan atau dapat disebut sebagai *network society*. Melalui kekuatan teknologi informasi, segala tindakan manusia dapat dilakukan melalui model kehadiran jarak jauh, yang memberi dampak serius pada nilai-nilai kultural yang terkait interaksi itu (Piliang, 2017). Sumbangan teknologi komunikasi menciptakan sebuah fenomena. Salah satu fenomena yang menarik dalam perkembangan teknologi adalah lahirnya internet, memberikan kemudahan bagi orang untuk saling berinteraksi dalam jangka waktu yang cepat, mudah, dan masif, tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Perkembangan teknologi internet, diyakini banyak pihak memberikan alternatif saluran komunikasi yaitu terciptanya media sosial atau jejaring sosial bagi masyarakat.

Menjalankan strategi komunikasi politik menghadapi pemilu legislatif membutuhkan perencanaan yang tersusun secara rapih, dan yang terpenting adalah dalam perencanaan yang dibuat memuat sasaran atau target dukungan pemilih. Maksimalisasi komunikasi politik sebagai tema besar dari seluruh rangkaian strategi yang dibangun menjadi mutlak bagi para calon legislatif. Tanpa komunikasi politik yang efektif, maka aktifitas politik akan kehilangan bentuknya. Olehnya itu salah satu unsur terpenting dalam komunikasi politik adalah sumber pesan, yaitu seorang pemimpin dituntut untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada pendukungnya dan masyarakat luas. Di samping itu, calon yang bersangkutan harus tahu saluran atau sarana penyampaian informasi yang tepat. (Rafael Raga Maran: 2001: 163

Hukum di Indonesia menempati posisi penting dalam pelaksanaan Negara. Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi untuk mengatur segala kegiatan dan tindakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Dari segi pengertian dan istilah tentang Negara hukum terdapat perbedaan yang signifikan dan sulit untuk mempertemukannya dalam satu persepsi, hal ini disebabkan perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun kondisi masyarakat dan zaman pada saat perumusan Negara hukum dikemukakan. Negara-negara Eropa Continental dan anglosaxon bahkan memberikan ciri yang agak berbeda mengenai Negara hukum tersebut. (Muh. Hasrul, 2014:17). Menurut Frederich Julius Stahl dalam Muh. Hasrul menegaskan ciri-ciri Negara hukum Eropa continental (*rechtsstaat*) meliputi: 1) mengakui dan melindungi hak asasi manusia; (2) untuk melindungi hak asasi tersebut penyelenggaraan Negara harus berdasarkan pada teori *trias politica*; (3) dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); (4) apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten Maros diikuti oleh 12 partai politik yang lolos seleksi dan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Banyaknya partai politik yang mengikuti pemilu legislatif merupakan konsekuensi dari sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Keterlibatan banyak partai dalam mengusung kandidat calon legislatif memberikan dampak politik yang luar biasa dan merupakan tantangan tersendiri bagi partai politik pengusung dan caleg. Banyaknya partai dan caleg akan berdampak pada ketatnya kompetisi dalam menggaet suara pemilih untuk untuk memperoleh kursi parlemen. Keberhasilan partai politik pengusung dan caleg yang diusulkan dalam kontestasi pemilu legislatif di kabupaten Maros akan membuktikan besarnya dukungan dan keparcayaan masyarakat Maros terhadap partai politik dan figure legislatif yang diusungnya. Nama Chaidir Syam dalam jajaran politisi muda di kabupaten maros telah sangat lazim terdengar. Politisi muda kelahiran Bone 2 Februari 1977. Sejak 2008-2010 telah menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Maros (PAW) dan Wakil Ketua DPRD Kab. Maros pada tahun 2010-2014. Praktis nama Chaidir Syam pada pemilu legislatif tahun 2014 bukan nama baru yang muncul dalam kontestasi

politik di Kabupaten Maros.

Bahkan dalam survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Maros Periode 2019-2024 yakni anggota DPRD Maros yang meminta masukan masyarakat dalam penyusunan Ranperda rata-rata hanya 32,17 %, Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Uji Publik rata-rata 17 %, Sedangkan secara umum keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Ranperda di Dapilnya yang disusun oleh anggota DPRD rata-rata hanya 13,17 % kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Maros kepada masyarakat terhadap Perda yang telah ditetapkan rata-rata hanya 38 % selanjutnya manfaat Perda yang telah ditetapkan oleh Anggota DPRD bagi masyarakat rata-rata hanya 53,3 %. Kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Maros untuk fungsi Legislasi rata-rata 35,83 %, dan yang tidak puas 27,83 %, serta tidak tahu 36,34 %.

Strategi komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif dapat dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Maros dengan beberapa langkah:

- 1 Transparansi
- 2 Keterlibatan Masyarakat
- 3 Komunikasi Efektif
- 4 Pendidikan Politik
- 5 Aksi Nyata
- 6 Kolaborasi
- 7 Pengelolaan Krisis

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, lembaga legislatif dan eksekutif dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat Maros dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus (case study) mendeskripsikan kondisi dan situasi terkait hubungan personal di media sosial dalam konteks pemilihan legislatif-eksekutif. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Sumber data primer yaitu berasal dari informan, Legislatif, Eksekutif serta staf dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data sekunder berupa hasil observasi, catatan lapangan, pemberitaan media cetak atau media online, media sosial, buku- buku, dokumen maupun foto-foto relevan dengan kajian penelitian ini. Teknik analisis data dari Reduksi data, penyajian data (data display), Kesimpulan/Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat strategi komunikasi politik legislatif-eksekutif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Maros serta upaya-upaya dilakukan oleh kedua lembaga tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Maros. Maka, peneliti menanyakan kepada beberapa informan untuk menganalisa hubungan komunikasi politik yang dijalankan oleh kedua lembaga (DPRD dan Pemda) terutama dalam kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepercayaan masyarakat kabupaten Maros. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan mengenai pemerintahan daerah yang melibatkan kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Strategi Komunikasi Politik Legislatif-Eksekutif Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Maros

Strategi komunikasi politik yang dibangun oleh kedua lembaga legislative dan eksekutif tidak terlepas dari ketentuan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah desentralisasi, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah, kecuali sejumlah urusan (diplomasi luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, agama, dan urusan lainnya) yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

Di dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sangat penting dan menentukan. Kepala Daerah dan DPRD berwenang menentukan pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa hubungan yang baik antara pihak eksekutif (Kepala Daerah - Bupati) dan DPRD (legislatif) sangat menentukan kinerja pembangunan daerah.

Hubungan Bupati dengan DPRD Kabupaten Maros diwujudkan dalam komunikasi politik. Dalam penelitian akan dilakukan penyelidikan komunikasi politik antara Bupati Maros dengan DPRD Maros. Secara khusus, penelitian akan terfokus pada empat hal, yaitu : (1) sikap dan perilaku legislatif dan eksekutif, (2) perkembangan interaksi eksekutif dengan legislatif, (3) perubahan struktur (pola-pola interaksi) eksekutif dengan legislatif, serta (4) deskripsi kendala hubungan tersebut.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 10 orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang komunikasi politik antara pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Maros. Responden terdiri dari 60 orang aparatur Pemerintah Kabupaten Maros dan 40 orang anggota DPRD Maros. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data sekunder termasuk keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, agama dan LSM di Kabupaten Maros.

Berdasarkan data yang dikumpul, ditemukan bahwa kedua pihak (eksekutif maupun legislatif) melakukan komunikasi politik terhadap publik Maros. Mengingat bahwa Maros telah mengarah menjadi daerah industri, terlihat jelas bagaimana masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan industri menjadi isu sentral termasuk dalam bidang politik. Tuntutan kenaikan gaji dari kelompok buruh merupakan isu yang populer di kalangan legislatif maupun eksekutif.

2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Legislatif dan Eksekutif Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kabupaten maros

Dalam upaya menjaga harmonisasi hubungan antara pihak legislatif dan eksekutif sendiri memperlihatkan gejala yang cukup menarik, dimana masing-masing pihak merasa lebih superior. Sadar atau tidak, kecenderungan ini mengakibatkan adanya tarik menarik kepentingan antara kedua institusi. Masing-masing insitusi saling mempengaruhi, karena kebetulan pihak Bupati Maros berasal dari Partai Amanat Nasional, dan Ketua DPRD Kabupaten Maros sendiri dari fraksi Golkar, fraksi Golkar termasuk fraksi yang signifikan. Ketua DPRD Kabupaten Maros pun sebenarnya berasal dari fraksi Golkar.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa institusi eksekutif maupun legislatif memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak eksekutif lebih memahami kedudukan mereka sebagai pelaksana kebijakan, sehingga dengan sendirinya mereka lebih memiliki akses politik, khususnya terhadap publik. Di sisi lain, pihak legislatif merasa bahwa sesuai dengan kewenangannya, mereka dapat berada di atas pihak eksekutif. Mengingat bahwa DPRD-lah yang memilih Kepala Daerah, maka dengan sendirinya Kepala Daerah harus tunduk kepadanya.

Dengan cara berfikir seperti ini, DPRD menjadi sangat kuat ketika berhadapan dengan Kepala Daerah. Hal ini sangat jelas terlihat saat Bupati Maros menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Maros. Dalam beberapa hal, penilaian terhadap LPJ Bupati tersebut telah dijadikan sebagai alat tawar menawar kepentingan antara DPRD dengan Bupati.

Kuatnya kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di satu sisi bermakna sebagai pemberdayaan perwakilan rakyat. Akan tetapi ternyata tidak ada jaminan bahwa kedudukan DPRD yang kuat akan meningkatkan kinerja pembangunan di daerah. Dalam kasus di Maros terlihat bahwa kuatnya DPRD pada akhirnya hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri, bukan menguntungkan kepentingan public.

Ditinjau dari perspektif ketahanan nasional, kedudukan DPRD yang kuat seyogyanya akan sangat positif, karena dengan demikian DPRD dapat memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa perlu dibayang-bayangi rasa

takut, seperti di-recall. Sebagai lembaga politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, DPRD sebenarnya dapat menjadi lembaga yang efektif untuk menentukan dan mengontrol jalannya pembangunan daerah. Berlangsungnya pemerintahan daerah yang baik pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan di daerah, dan dengan sendirinya akan meningkatkan ketahanan nasional di daerah.

Kenyataannya, kewenangan yang kuat pada DPRD ternyata hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri. Fakta empirik ini semakin memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa untuk terwujudnya ketahanan nasional di daerah, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebaiknya sejajar (bermitra). Dalam keadaan seperti ini, pihak legislatif dan eksekutif berada pada posisi yang seimbang dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, rekrutmen anggota DPRD perlu disempurnakan sehingga mereka yang duduk pada lembaga legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwasanya semua fungsi dalam pelaksanaan sistem politik, rekrutmen politik dan lain sebagainya dilakukan dengan cara berkomunikasi. Menurut Maswadi Rauf dalam Harun dan Sumarno (2006:3-5) komunikasi politik berfungsi sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial, sedangkan komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka komunikasi politik itu merupakan sebuah kegiatan politik yang memiliki ciri aktor politik yang melakukan kegiatan – kegiatan politik seperti menyampaikan pesan – pesan yang mengandung unsur politik ataupun ajakan untuk memilih kandidat. Faktor tujuan dalam komunikasi politik itu, jelas pula tampak pada definisi yang diketengahkan oleh Lord Windlesham dalam karyanya, *What is political communication* adalah “Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu (Effendy, 2003:158).”

Berdasarkan pemaparan Effendy mengenai komunikasi politik itu merupakan proses penyampaian sebuah pesan politik yang dilakukan dengan sengaja oleh aktor politik kepada masyarakat agar terciptanya sebuah komunikasi dalam menggiring perilaku masyarakat. Kemudian komunikasi politik menurut penuturan Dan Nimmo komunikasi politik sebagai berikut “Menurut Dan Nimmo (2005: 8) “komunikasi Politik yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi – konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. “Menurut penuturan tersebut inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu. Komunikasi politik dengan demikian adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan.

Dari pengertian - pengertian di atas menunjukkan pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan

atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat untuk terwujudnya suatu jalinan komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sifat-sifat integrative. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat fungsi - fungsi itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik

Audiens atau pendengar. Komunikasi terlibat dalam pembuatan gabungan atau transaksi antara sumber dan penerima. Khalayak komunikasi politik bukanlah wadah yang pasif yang ke dalamnya para pemimpin politik dengan berbagai karakteristik dan motif hanya menuangkan beraneka imbauan dengan menggunakan bahasa, simbol, piranti, dan media yang menarik.

Umpan balik. Akibat komunikasi diturunkan dari interaksi antara tiga unsur yang dapat dipisahkan: pesan, khalayak yang diduga akan dipengaruhi, dan pengaruh yang diakibatkannya. Singkatnya, akibat tidak ditentukan terpisah dari interpretasi: bahkan, akibat adalah tindakan interpretatif sinambung yang diturunkan dari penyusunan opini personal, sosial, dan politik. Menurut pemaparan di atas bahwasanya komunikasi politik memiliki beberapa unsur yang terhubung satu sama lain, misalnya dalam komunikasi politik harus ada seseorang politikus sebagai aktor utama yang menjadi sumber kemudian ada pesan yang disampaikan, tentu saja pesan tersebut berisi tentang narasi – narasi politik yang harus sesuai dengan target dari politikus tersebut lalu ada saluran, saluran ini bisa berbentuk media penyampaian pesan – pesan politik yang disampaikan bisa melalui media massa, media cetak ataupun media sosial.

Dengan adanya media seorang politikus akan terbantu dalam proses penyebaran pesan – pesan politik yang disampaikan dan pesan tersebutpun akan sampai ditataran pendengar kalangan yang paling ingin disentuh oleh politikus, kemudian harus adanya audiens sebuah komunikasi politik akan berjalan apabila adanya komunikator dan komunikan, ada yang menyampaikan pesan dan ada yang mendengarkan pesan. Audiens disini sangat penting dikarenakan pesan politik yang disampaikan harus tepat sasaran agar terjadinya feedback atau umpan balik hal ini terjadi akibat terjadinya sebuah komunikasi serta umpan balik ini akan bereaksi apabila pesan yang disampaikan tepat atau tidaknya kepada audiens.

Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwasanya komunikasi politik memiliki dua orientasi yang pertama komunikasi politik bertujuan pada nilai ataupun usaha dalam menggapai tujuan tersebut, nilai - nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. Kemudian yang kedua menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu dengan begitu sudah terlihat jelas bahwasanya tujuan komunikasi politik itu terlihat arah maupun orientasinya dengan jelas

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yakni bahwa dalam membangun komunikasi politik antara yudikatif dan eksekutif maka diperlukan minimal empat indikator yakni Secara khusus, penelitian akan terfokus pada empat hal, yaitu : (1) sikap dan perilaku eksekutif dan legislatif, (2) perkembangan interaksi eksekutif dengan legislatif, (3) perubahan struktur (pola-pola interaksi) eksekutif dengan legislatif, serta (4) deskripsi kendala hubungan tersebut.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh yudikatif dan eksekutif dalam membangun kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hubungan baik dan terukur terutama dalam menghasilkan kebijakan publik yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Maros.

REFERENSI

- 1 Arifin, A. (2002). Komunikasi sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Rajawali.
- 2 A. Shimp, Terence. 2003. Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: Erlangga
- 3 Bachsan Mustafa, S. H. (2018). Pengantar Hukum Administrasi Logistik. Citra Aditya Bakti.
- 4 Budi Hardiman, F. 2021. Aku Klik Maka Aku Ada. Yogyakarta: Kanisius
- 5 Budianto, H. 2019. Kontestasi Politik Dalam Ruang Media. Jakarta : Kencana
- 6 Bugin, Burhan. 2018. Komunikasi politik pencitraan. Jakarta : Kencana
- 7 Cabannes, Y., & Lipietz, B. (2018). Revisiting the democratic promise of participatory budgeting in light of competing political, good governance and technocratic logics.
- 8 Deliarnov, E. P. (2006). Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif. Jakarta: Erlangga.
- 9 Dweck Carol S. 2020. Self-Theories - Wawasan psikologi terbaru tentang Motivasi, Kepribadian dan Pengembangan Diri. Tangerang Selatan: Penerbit Baca
- 10 Donner, W. R. (2007). The political ecology of disaster: An analysis of factors influencing US tornado fatalities and injuries, 1998–2000.
- 11 Firmanzah, M. P., & Pemahaman, A. (2007). Realitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Gunawan , Budi dan Barito Mulyo Ratmono. 2020. Kebohongan Di Dunia Maya. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- 12 Fry, B. R., & Raadschelders, J. C. (2013). Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo. CQ Press.
- 13 Goodnow, F. J. (2003). The principles of the administrative law of the United States. The Lawbook Exchange, Ltd.
- 14 Gunawan , Budi dan Barito Mulyo Ratmono. 2021. Demokrasi Di Era Post Truth. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- 15 Hamid, Nuril. 2020. Deradikalisasi Melalui Internet Dan Media Sosial. Yogyakarta: Arruzz Media
- 16 Ida, H. S., & Subiakto, H. (2012). Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi. Jakarta. Kencana Prenada. Media Group.
- 17 Jurdi, F. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Kencana. Kenski, K., & Jamieson.
- 18 Kartajaya, Hermawan. 2004. Hermawan Kartajaya on Brand. Bandung: Mizan Pustaka.
- 19 K. H. (Eds.). (2017). The Oxford handbook of political communication. Koopman, C. (2019). Information before information theory: The politics of data beyond the perspective of communication. *New Media & Society*, 21 (6), 1326 - 1343.
- 20 Labuschagne, P. (2006). Trias politica as guiding constitutional principle in the modern state: obsolete relic or constitutional necessity?. *Politei a*, 25 (1), 18 – 29
- 21 Lair, Sullivan, dan Cheney. 2005. "Marketization and the Recasting of the Professional Self" *Management Communication Quarterly*. Colorado: Denver
- 22 Piliang, Yasraf Amir. 2017. Dunia yang berlari. Yogyakarta : Cantrik Pustaka
- 23 Pureklolon, Thomas Tokan. 2018. Komunikasi Politik. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- 24 Rangkuti, Freddy. 2013. Strategi Semut Melawan Gajah untuk membangun Brand Personal, Produk, dan Perusahaan. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- 25 Rampersad, H. K. (2008). Authentic personal branding. Jakarta: PPM Publishing.
- 26 Semetko, Holli A. & Margaret Scammell. 2016. Handbook Komunikasi Politik. Bandung: Nusa Media
- 27 Sumaryono. 2021. Strategi Personal Branding Dalam Pemenang Pemilu Legislatif. Dalam *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media: Volume 5, Nomor 1*.
- 28 Wasesa, Silih Agung. 2018. Political Personal Branding. Jakarta Selatan: Penerbit Expose
- 29 Wibowo, P.A. 2013. Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi. Jakarta : PT. Gramedia